

DEMOKRASI DAN KABANGKITAN POLITIK IDENTITAS: REFLESKI PERJALANAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Mahpudin

Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: Mahpudinapud3@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan sebuah refleksi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia pasca orde baru Soeharto dengan menggunakan perspektif *society*. Se jauh mana demokrasi Indonesia yang berlangsung selama 20 tahun sejak digulirkan pada masa reformasi tahun 1998 dan apa faktor yang menghambat tumbuh kembangnya demokrasi menjadi pertanyaan besar yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan teori tentang politik identitas yang digagas oleh beberapa ahli. Metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif, sementara pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soeharto menyebabkan perjalanan demokrasi di Indonesia selama dua dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit. Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etnisitas dan agama telah menimbulkan praktik diskriminasi dan pengeksklusian terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik yang memainkan peran penting dalam mempertajam sentimen identitas dan agama untuk mendapatkan kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu. Hal ini membuat demokrasi mengalami regresi.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik Identitas, Pemilu

ABSTRACT

This paper is a reflection of the journey of democracy in Indonesia after Suharto's new order using the perspective of society. To what extent has Indonesia's democracy lasted 20 years since it was rolled out during the 1998 reform period and what factors have hindered the growth of democracy are a big question to be answered in this paper. To answer this question, this paper uses theories about identity politics initiated by several experts. The research method uses qualitative-descriptive, while data collection is done through a literature review. The results of the study concluded that the rise of identity politics in Indonesia after Soeharto

caused the journey of democracy in Indonesia for two decades not to progress towards substantial democracy. Indonesian democracy in the end is still trapped in procedural democracy which is only intertwined with electoral matters and the process of changing elites. But in practice the lives of citizens still do not show a democratic life. Various cases of violence and intolerance and the strengthening of identity sentiments based on ethics and religion have led to the practice of discrimination and exclusion of other different identity groups. This condition is often exploited by political elites who play an important role in sharpening identity and religious sentiment to gain power, especially entering the election period. This makes democracy regress.

Keywords: Democracy, Identity Politics, Election

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan sebuah refleksi tentang perjalanan demokrasi di Indonesia pasca orde baru dengan menggunakan perspektif *society*. Sejauh mana demokrasi di Indonesia yang belangsung selama 20 tahun sejak digulirkan pada masa reformasi tahun 1998 dan apa faktor yang menghambat tumbuh kembangnya demokrasi adalah pertanyaan besar yang hendak dijawab dalam tulisan ini. Pasca tumbangannya rezim otoritarian orde baru, Indonesia memasuki masa transisi ke arah sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Hal ini ditandai dengan dibukanya keran kebebasan politik yang diikuti dengan fenomena menjamurnya partai politik baru, kebangkitan asosiasi masyarakat sipil dan kebebasan media. Selain itu, format institusi dan kelembagaan politik yang baru mulai diperkenalkan lewat sejumlah aturan pemilu yang lebih demokratis dan perimbangan kekuasaan antar lembaga negara yang dikenal sebagai *trias politica*. Satu hal yang tidak kalah penting adalah format perimbangan kekuasaan dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi melalui pintu otonomi daerah.

Jika melihat berbagai perubahan format dan *setting* politik ini, nampaknya ada optimisme terkait masa depan Indonesia yang lebih demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Namun banyak pengamat menilai bahwa demokrasi yang diperkenalkan pasca orde baru terjebak pada aspek prosedural sehingga tidak banyak mengubah kehidupan sosial politik yang lebih substantif. Hal ini ditandai dengan meskipun terjadi perubahan infrastruktur kelembagaan politik dan perimbangan kekuasaan yang lebih demokratis, tetapi ide representasi masih lemah karena dimonopoli oleh aktor dominan sementara kekuatan sipil *society* tidak menunjukkan kekuatan yang berarti sebagai penyeimbang dominasi kekuasaan negara dan elit politik. Bahkan banyak aktivis dari kalangan masyarakat sipil berhasil masuk ke lembaga politik karena mempolitisasi masyarakat sipil (Tornquist, 2013). Selain itu, demokrasi di Indonesia pasca orde baru hanya dikuasi oleh segelintir elit oligarkis yang berusaha mengakumulasi kekayaan dengan berhubungan atau terjun langsung dalam dunia politik baik melalui jalur pendirian

partai politik maupun lewat pintu pemilu (Hadiz dan Robinson, 2004; Winters, 2014). Sementara partai politik yang tumbuh dan berkembang pasca Soeharto menjadi lebih pragmatis dengan membangun sistem kepartaian yang terkartelisasi untuk menghisap sumber daya politik ekonomi (Slater, 2004; Mietzner, 2008; Ambardi, 2009). Patologi dan paradoks yang ditemukan dalam perjalanan demokrasi pasca orde baru oleh banyak ahli politik ini mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemandegan jika tidak dikatakan kemunduruan.

Namun, *assesment* demokrasi oleh para ahli cenderung melihat hanya dari perspektif elit dengan pendekatan struktural. Penilaian demokrasi dari perspektif *society* belum banyak muncul. Padahal *society* sebagai bagian dari entitas demokrasi menjadi penting untuk diamati. Maju dan mundurnya demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana *society* dan relasi politik yang bekerja didalamnya dapat mendukung atau justru menghambat bekerjanya demokrasi. Saya berargumen bahwa gelombang demokratisasi yang diperkenalkan pasca orde baru menjadi pintu bagi kebangkitan politik identitas yang pada akhirnya menciderai makna demokrasi itu sendiri. Rakyat menjadi kian mudah terfragmentasi oleh sekat-sekat identitas. Keadaan ini semakin diperparah oleh elit politik yang mencoba mencari kekuasaan dengan mengeksploitasi politik identitas, utamanya menjelang kontestasi elektoral.

Politik identitas sebagai konsekuensi dari dibukannya keran demokrasi sejak tahun 1998 menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam mengingat isu-isu identitas sampai hari ini masih menghiasi wajah perpolitikan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Proses kandidasi dalam politik elektoral, perilaku pemilih dalam menentukan calon pemimpin, tuntutan akan pemekaran daerah, dan meletusnya berbagai konflik komunal tidak lepas dari politik identitas (Nordholt & Klinken, 2007). Di tingkat nasional, proses politik pemilihan calon presiden periode 2019-2024 yang mengkontestasikan dua pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Sementara, di tingkat lokal, politik elektoral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 adalah dua fenomena kontemporer yang tidak bisa dilepaskan dari analisa tentang politik identitas. Untuk membahas lebih lanjut soal hubungan demokrasi dan politik identitas, tulisan ini akan dimulai dengan mendudukan konsep politik identitas sebagai sebuah fenomena politik, selanjutnya membahas bagaimana politik identitas berkerja dalam demokrasi Indonesia sebelum dan pasca orde Baru tahun 1998 hingga sekarang. Terakhir tulisan ini ditutup dengan sebuah refleksi kritis terkait perjalanan demokrasi Indonesia selama 20 tahun.

Kerangka Teori

Politik identitas merupakan sebuah fenomena politik yang terjadi pada masyarakat dibelahan dunia mana pun baik di negara maju maupun berkembang dengan ragam pola dan karakteristik sesuai dengan konteks yang terjadi di negara tersebut. Politik identitas perlu dibedakan dengan identitas politik. Istilah identitas

politik mengacu pada konstruksi yang menentukan kepentingan posisi subjek dalam suatu masyarakat yang membedakan dengan identitas masyarakat lain. Sementara politik identitas dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan identitas sebagai sarana dan sumber politik (Haboddin, 2012:119). Identitas yang dimaksud berupa kesamaan terhadap etnis, agama, ras, jenis kelamin, kepercayaan, adat, kelompok dan golongan. Dalam kajian ilmu politik, istilah politik identitas mulai muncul ke permukaan dari hasil pertemuan Internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional pada tahun 1994 yang menghasilkan kesepakatan bahwa politik identitas masuk dalam kajian ilmu politik (Abdillah, 2002:16). Kendati demikian, pemaknaan politik identitas bersifat cair sebab para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah politik identitas.

Agnes Heller (dalam Abdillah, 2002:16) mengambil definisi bahwa politik identitas sebagai gerakan politik yang menempatkan perbedaan sebagai kategori politik utama (*politics of difference*). Proses pencarian perbedaan ini berimplikasi pada praktik meniadakan orang lain (*lian*) yang tidak termasuk dalam kategori identitas yang sama (Hikmawan, 2017b). Konsekuensinya, politik identitas membentuk demarkasi yang sangat tegas antara siapa kelompok yang terlibat dalam identitas yang sama dan kelompok lain yang berbeda dengan membentuk kategori “kami” (*we*) dan “mereka” (*they*), dalam (*in*) dan luar (*out*) (Morowitz, 1998). Berangkat dari definisi ini, politik identitas dilihat dari sudut pandang politik perbedaan. Individu atau komunitas dalam suatu masyarakat akan mencari kesamaan-kesamaan identitas sebagai pengikat individu ke dalam kelompok. Sementara, ketika terdapat perbedaan identitas, maka secara langsung orang atau kelompok yang berbeda ini tidak masuk kategori kelompok identitas yang lain. Kendati demikian, garis pisah antar kelompok yang berbeda ini tidak selalu tegas. Pada konteks tertentu, dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat tumpah tindih dan garis pemisah yang kabur dalam membedakan kelompok identitas lainnya. Khususnya bagi individu atau kelompok yang memiliki lebih dari satu identitas. Karena itu, identitas adalah hasil konstruksi terus-menerus dan tidak pernah final (*fixed*) (Hikmawan, 2017a). Makna identitas terus dikontestasikan untuk mencapai posisi subjek tertentu yang membedakan dengan kelompok yang lain.

Politik identitas tidak hanya soal pencarian perbedaan identitas. Politik identitas dapat muncul sebagai bentuk perjuangan politik dalam merebut kekuasaan berdasarkan identitas tertentu. Perjuangan merebut kekuasaan politik ini dilakukan oleh kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi, penindasan, dan keterpinggiran secara sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam kurun waktu yang relatif cukup lama (Kristanus dalam Buchari, 2014:27). Sehingga politik identitas utamanya bukan karena dipicu oleh pengorganisasian kelompok lewat afiliasi organisasi atau partai tertentu, melainkan terlebih dahulu dipicu karena perasaan terisolasi dan ketidakadilan (Buchari, 2014:28). Praktik marginalisasi dan diskriminasi ini dapat dilakukan oleh kelompok lain dalam praktik relasi sosial atau oleh rezim yang berkuasa. Oleh sebab itu, politik identitas pada umumnya sebagai perjuangan

politik dalam menuntut pengakuan (*politics of recognition*) dan kesetaraan (*politics of equal respect*).

Pandangan lain berargumen bahwa politik identitas sebagai bentuk strategi dan retorika yang biasa digunakan oleh para elit politik untuk melanggengkan jalan merebut kekuasaan (Chandrakirana, 1989). Elit politik atau para pemimpin kelompok dengan sengaja mengkonstruksi identitas untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi masyarakat dari kelompok identitas tertentu untuk memenangkan persaingan. Akibatnya, dalam sebuah fenomena politik yang memperebutkan akses terhadap jabatan dan sumber daya, terdapat kontestasi identitas dalam sebuah masyarakat. Sistem demokrasi yang membuka peluang kepada siapa pun secara bebas untuk bersaing dalam berebut kekuasaan, membuat proses persaingan penuh dengan ketidakpastian. Implikasinya, elit politik dan pemimpin kelompok mengeksploitasi simbol-simbol identitas untuk memobilisasi masyarakat sehingga politisasi sipil tidak dapat dihindari karena mobilisasi sipil menggunakan sentimen identitas sangat efektif karena melibatkan ikatan emosional kelompok (Jumadi, 2003).

Politik identitas sebagai strategi dan gerakan politik untuk merebut kekuasaan dalam perjalanannya mengalami pergeseran. Beyme (dalam Abdillah, 200:17) menganalisis karakter gerakan politik identitas melalui tiga tahap. Pertama, tahap pramodern. Konflik dan perpecahan kelompok kesukuan dan kebangsaan menghasilkan gerakan politik identitas yang dimobilisasi oleh pemimpin kelompok dengan tujuan merebut kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa yang baru. Kedua, tahap modern. Gerakan politik identitas muncul secara kondisional dimana perpecahan kelompok dan kebangsaan memerlukan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Implikasinya, terjadi pola interaksi dua arah, yaitu mobilisasi dari atas oleh pemimpin dan partisipasi dari bawah oleh anggota kelompok identitas. Peran pemimpin tidak lagi dominan sehingga mengharuskan adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, tahap post modern. Gerakan politik identitas muncul secara acak mengikuti dinamikanya sendiri. Bentuk protes atas nama identitas tertentu *base on* kesadaran diri yang menuntut otonomi sebagai tujuan akhir.

Dari pemaparan ini, maka dapat dilihat bahwa para ahli memaknai fenomena politik identitas secara berbeda. Setidaknya, jika merujuk pada pemaparan diatas terdapat tiga narasi yang dapat menjelaskan politik identitas. Pertama, politik identitas memfokuskan perbedaan sebagai kategori politik. Kedua, politik identitas sebagai ekspresi hadirnya perasaan marginalisasi dan ketidakadilan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, politik identitas sebagai strategi politik para elit untuk memperoleh kekuasaan. Apabila melihat varian pemaknaan politik identitas ini, implikasinya politik identitas dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, praktik politik identitas dapat berdampak positif karena dapat memperkuat ikatan komunitas dan mampu merubah karakter politik yang eksklusif dan menindas menjadi inklusif melalui sejumlah agenda perjuangan politik. Namun di sisi lain, politik identitas

dapat berdampak negatif. Proses pencarian identitas dengan mengkonstruksi perbedaan berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan komunal baik secara horizontal maupun vertikal. Suatu kelompok yang eksis dalam sebuah masyarakat akan saling meniadakan satu sama lain untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Dua implikasi tersebut menempatkan politik identitas sebagai sebuah kajian yang akan terus mendapat perhatian terutama yang berkaitan dengan identitas keetnisan, gender, masyarakat pribumi dan masyarakat lokal (Geertz, 1963). Realitas masyarakat yang beragam identitas ini menyebabkan konflik sulit dihindari terlebih bagi negara-negara dengan karakteristik yang plural termasuk Indonesia. Sebab merujuk pada tesis Furnival (dalam Lee, 2009) menyebut bahwa masyarakat plural sebagai masyarakat yang terdiri dari lebih dari satu identitas kelompok dimana mereka hidup berdampingan tetapi tidak berbaur sehingga sangat berpotensi terjadinya gesekan antar kelompok karena diantara kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda ini tidak ada kehendak hidup bersama (*common will*) untuk menyatu dalam satu identitas yang lebih besar.

Politik identitas akan terus menjadi ancaman yang serius. Demokrasi liberal telah ikut berkontribusi menajamkan politik identitas dan tuntutan atas pengakuan identitas kelompok yang berujung pada konflik, ujaran kebencian dan tindakan kekerasan. Banyak kasus-kasus kerasaan atas nama identitas baik etnis maupun agama terjadi di negara maju maupun berkembang. Ihwal ini telah diprediksi oleh Huntington (2007) bahwa pasca berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan kematian ideologi sebagai doktrin politik, dunia selama abad ke-21 akan dihiasi oleh benturan peradaban yang dipicu oleh masalah politik identitas, sektarianisme dan intoleransi agama. Fukuyama (2018) dalam bukunya "*Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*" dengan detail memotret bagaimana politik identitas terjadi bahkan di negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat dan negara-negara di eropa lain. Demokrasi liberal yang memberikan kebebasan kepada setiap orang menyebabkan identitas menjadi diskursus yang terus diperjuangkan karena setiap orang merasa bahwa keberadaan identitasnya harus diakui dan dihormati di tengah masyarakat. Implikasinya, identitas yang muncul sering kali saling bertentangan satu sama lain dengan identitas lainnya menyebabkan konflik di masyarakat.

Bahayanya, menurut Fukuyama, disamping perjuangan mendapat pengakuan sosial, tuntutan tersebut kerap kali berubah ingin menjadikan kelompok yang bersangkutan lebih superior dibandingkan dengan kelompok lain. Setiap kelompok merasa memiliki hak untuk diperlakukan lebih tinggi sehingga mengeksklusi dan memarginalkan kelompok lain. Tuntutan akan superioritas identitas kelompok ini membuat mereka menjadi anti kritik dan memandang bahwa identitas yang lain rebih rendah. Akibatnya, ujaran kebencian menjadi lahan yang subur. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan massa. Maka tidak heran jika politik di Amerika Serikat penuh dengan adu domba dan ujaran kebencian setiap kali menjelang tahun-tahun politik. Donald

Trump adalah contoh terbaik yang mengkonfirmasi tesis Fukuyama bahwa kemenangannya sebagai presiden tidak lepas dari strategi politik yang memainkan sentimen identitas. Hal tersebut mempertegas bahwa demokrasi liberal tengah menghadapi ancaman (Levistky & Ziblatt: 2018).

Berkaca dari bangunan teori Huntinton dan Fukuyama tentang kebangkitan politik identitas pada abad ke-21, dapat ditarik satu benang merah bahwa fenomena politik identitas dapat tumbuh subur dalam situasi politik yang demokratis sekalipun. Sebab problem hari ini tidak lagi memperdebatkan soal ekonomi politik harus dalam bingkai kapitalisme atau sosialisme. Justru yang terjadi adalah perdebatan menyangkut identitas politik yang sedang diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan, kesetaraan dan sekaligus kekuasaan untuk memperebutkan *resources*. Demokrasi yang idealnya menampilkan diri dengan wajah yang inklusif, *equal* dan mengutamakan kebebasan hak sipil, justru tercederai oleh praktik-praktik politik identitas. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Indonesia, dimana demokrasi sebagai pintu bagi kebangkitan politik identitas secara massif melalui bentuk konflik, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk mendalami diskusi terkait politik identitas yang terjadi di Indonesia akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif terkait perjalanan demokrasi di Indonesia pasca orde baru dengan menggunakan perspektif *society*. Creswell (2014) dalam menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif adalah proses riset dan pemahaman metodologi yang meneliti fenomena sosial dalam segala permasalahan manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi literatur dari buku, jurnal, dan media online, serta bahan rujukan lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Diskusi

Potret Politik Identitas Pada Masa Kolonial Hingga Rezim Orde Baru

Politik identitas pada masa kolonial hingga rezim orde baru mengalami pasang surut. Hal ini tidak lepas sebagai akibat dari pergantian rezim dan *setting* politik yang terjadi pada saat itu. Rezim kolonial yang sangat sentralistik dan otoriter sangat mengubur terjadinya sentimen identitas yang dapat berujung pada konflik dan kekerasan komunal sehingga dapat merugikan kepentingan penjajah. Pada masa pendudukan Belanda, terdapat klasterisasi masyarakat berdasarkan ekonomi dan sosial. Klaster pertama ditempati oleh bangsa eropa yang tidak lain adalah bangsa penjajah. Mereka berperan sebaga penguasa utama yang mengendalikan pusat pemerintahan. Klaster kedua ditempati oleh etnis China (Tionghoa) yang menjalankan fungsi perdagangan. Sementara klaster terbawah

ditempati oleh masyarakat pribumi. Ketiga klaster ini hidup berdampingan menempati suatu wilayah tetapi tidak salah berbaur. Mereka hidup masing-masing tanpa menghasilkan satu kesatuan bersama.

Sejarah kerusuhan etnis pertama terjadi di Batavia (saat ini Jakarta). Terjadi pembantaian etnis China oleh Belanda pada tahun 1740. Peristiwa berdarah terjadi karena pemerintah Belanda merasa tidak nyaman dengan keberadaan komunitas China yang masuk ke Batavia untuk berdagang. Selain itu, Belanda curiga bahwa pengusaha-pengusaha China berada di pihak masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Kecurigaan tersebut menguat dengan melihat banyaknya etnis China yang mulai berani melawan penjajah. Sementara, etnis China sudah menaruh kebencian kepada Belanda yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang menghambat aktivitas perekonomian etnis China. Implikasinya, terjadi kerusuhan berdarah selama 13 hari dimulai pada 9 Oktober 1740 yang menyebabkan tidak kurang dari 10.000 ribu warga China meninggal. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Geger Pecinan (Tirto.id, 2017).

Pada umumnya pemerintah kolonial sangat menghindari terjadinya konflik identitas. Fakta bahwa masyarakat yang majemuk ini rawan terjadi bentrokan yang berujung tindakan anarki. Karena itu, rezim kolonial berusaha untuk mengintegrasikan kelompok yang berbeda ini dengan mendoktrin isu nasionalisme. Akibatnya, masyarakat Indoensia saat itu mengalami pergeseran dari populasi rasial berdasarkan identitas tertentu ke populasi nasional. Selain itu, masyarakat yang majemuk ini membuat rezim kolonial menggunakan cara-cara otoriter dan sentralistik. Tindakan tersebut menyebabkan nilai-nilai lokalitas mengalami pengikisan. Tindakan represivitas rezim kolonial pada akhirnya mampu meredam munculnya konflik berdasarkan politik identitas (Furnival, dalam Lee, 2009).

Isu tentang politik identitas terus mengalami keterpinggiran hingga masa awal kemerdekaan sampai rezim orde lama, Soekarno. Walaupun isu identitas pada dasarnya menjadi kajian para pengamat tahun 1950-an, tetapi isu yang paling dominan lebih banyak memfokuskan pada kajian tentang partai politik, politik aliran dan *nation-building* (Nordholt & Klinken, 2009). Politik aliran menjadi penting untuk dilihat karena munculnya politik aliran sebenarnya ditopang oleh politik identitas. Politik aliran dipopulerkan oleh Clifort Geertz (1983) yang melihat masyarakat Jawa terbagi kedalam tiga varian yaitu abangan, santri dan priyayi. Perbedaan identitas masyarakat Jawa ini menyebabkan konflik komunal berdasarkan sentimen kepercayaan atau agama. Konflik terjadi karena adanya benturan ideologis dan ketidaksenangan dengan kelompok lain, pengaruh sistem stratifikasi sosial dan perjuangan kekuasaan politik yang cenderung mempertajam perbedaan agama dan kepentingan politik (Geertz, 1983).

Politik aliran yang dibangun atas perbedaan identitas ini berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat dalam memilih partai politik era 1950-an. Kelompok islam cenderung memilih partai-partai dengan platform islam seperti NU dan Masyumi. Sementara kelompok abangan dengan tradisi kebudayaan Jawa yang

sangat kental cenderung dekat dengan PNI atau PKI (Feith dalam Mietzner, 2008). Partai-partai pada masa ini berhasil membangun kedekatan dengan konstituen mereka tidak lepas karena strategi mereka menggunakan sentimen identitas yang terus dikonstruksi sehingga menjadi sebuah ideologi politik bagi masyarakat dalam menentukan preferensi politik. Era orde lama ditandai dengan munculnya ketegangan yang bersifat horizontal (Geertz, 1983).

Namun memasuki orde baru yang ditandai oleh kehadiran rezim otoritarian Soeharto, ketegangan komunal berdasarkan identitas tidak banyak muncul ke permukaan. Orde baru berhasil mengubur sentimen berbau identitas melalui represivitas rezim menggunakan militer (Nordholt & Klinken, 2009). Transisi dari rezim orde lama ke orde baru ditandai dengan pergeseran ketegangan (konflik) dari bersifat horizontal ke vertikal. Ketegangan politik aliran berdasarkan sentimen agama luntur, meski tidak sepenuhnya pada masa rezim Soeharto. Hal ini di latar belakang oleh beberapa faktor: pemberangusan PKI, diperkenalkannya kebijakan masa mengambang (depolitisasi massa), kebijakan asas tunggal (pancasila) dan hadirnya dominasi Golkar (Geertz, 1983).

Demokratisasi Pasca Orde Baru: Pintu Kebangkitan Politik Identitas?

Runtuhnya orde baru Soeharto pada tahun 1998 telah membawa politik Indonesia menuju angin segar perubahan ke arah yang lebih terbuka dan liberal. Rezim otoritarianisme digantikan dengan rezim demokratis yang ditandai dengan dibukanya keran kebebasan sipil dalam politik, reformasi kelembagaan, dan diperkenalnya konsep desentralisasi melalui pintu otonomi daerah. Kekuasaan yang semula tersentralisasi di pemerintah pusat, pasca orde baru, kekuasaan tersebar ke berbagai daerah dengan beragam aktor politik. Baik aktor lama maupun aktor baru saling berkontestasi memperebutkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi politik melalui peluang yang ditawarkan dalam *setting* demokrasi liberal (Haryanto, 2009).

Di lain pihak, tumbangnya rezim orde baru diikuti oleh kondisi negara yang lemah. Menurut Nordholt & Klinken (2009) dalam praktik politik secara empiris menunjukkan bahwa pergeseran dari pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi tidak sama dengan pergeseran dari pemerintahan otoriter ke demokratis. Tidak juga pergeseran dari negara kuat ke masyarakat sipil yang kuat. Lemahnya kontrol negara membuat para elit politik dan masyarakat sipil berebut kekuasaan yang sebelumnya didominasi oleh negara melalui pemerintah pusat. Politik berebut kekuasaan pada masa pasca Soeharto menjadi sangat kental dengan unsur politik Identitas. Pergulatan mencari identitas etnis dan keagamaan menjadi ciri khas lanskap politik Indonesia pasca orde baru.

Hal ini ditandai dengan banyaknya peristiwa kerusuhan dan konflik atas dasar identitas etnis dan agama yang terjadi di Indonesia sejak runtuhnya orde baru. Antara tahun 1997 hingga 2002 terjadi perang saudara yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, pada periode ini pula ditandai dengan maraknya tuntutan untuk pemerataan

daerah yang dilandasi oleh sentimen etnis dan agama. Pada tahun 1999, jumlah kabupaten di Indonesia sebanyak 300 dan meningkat pesat menjadi 440 pada tahun 2004 (Nordholt & Klinken, 2009). Konflik dan kekerasan komunal serta tuntutan pemekaran daerah pada masa transisi menggambarkan bagaimana repetoar etnis dan agama digunakan untuk mengekspresikan ambisi politik dan memobilisasi dukungan rakyat.

Tidak selesai pada masa transisi, politik identitas terus digunakan sebagai perjuangan politik meraih kekuasaan. Sejak tahun 2005, diperkenalnya desain pemilu secara langsung yang memberikan hak politik kepada warga negara untuk memilih calon pemimpin politik, semakin mempertajam eksploitasi politik identitas. Pemimpin politik di daerah selama masa orde baru telah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga menutup kesempatan masyarakat lokal memiliki calon pemimpin yang lahir dari putra asli daerah. Namun setelah reformasi dan pemilu langsung, tuntutan untuk memiliki calon pemimpin pribumi menjadi sangat kuat. Implikasinya, politik elektoral sangat kental dengan nuansa politik pribumi dan non pribumi yang dibalut dengan sentimen identitas. Di situ sisi, kondisi ini memberi peluang politik kepada masyarakat lokal yang selama rezim orde baru mengalami marginalisasi dan peminggiran dalam arena politik untuk tampil ke ruang publik merebut kekuasaan dan sumber daya ekonomi politik. Namun di sisi yang lain, penggunaan politik identitas dalam politik elektoral menyebabkan praktik pengeksklusian dan diskriminasi terhadap warga negara lain yang memiliki identitas berbeda di suatu wilayah.

Salah satu contoh implikasi yang pertama misalnya terjadi pada kasus pemilihan Gubernur pada Pilkada tahun 2007 di Kalimantan Barat yang sukses memenangkan Conelis sebagai gubernur yang berasal dari etnis terbesar di Kalimantan Barat, etnis Dayak. Selama ini, sebelum diperkenalkannya desentralisasi dan pemilihan kepala daerah langsung, tidak ada jabatan gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Barat yang berasal dari etnis Dayak. Selain itu, pos-pos pemerintahan lainnya didominasi oleh birokrat non Dayak. Marginalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Dayak dalam kurun waktu yang lama hingga masa orde baru Soeharto telah membuat ikatan emosional yang sangat kuat yang berakhir pada munculnya politik identitas. Hal ini ditandai dengan kuatnya konsolidasi etnis dayak dalam memilih calon pemimpin yang berasal dari etnis Dayak sebagai gubernur pada Pilkada tahun 2007 dengan memanfaatkan peluang demokrasi dan desentralisasi melalui pintu politik elektoral. Keberhasilan Cornelis menjadi gubernur yang berasal dari etnis Dayak menjadi simbol berhasilnya penggunaan politik identitas dalam merebut kekuasaan. Segera setelah Cornelis terpilih, pos-pos jabatan birokrasi pemerintahan di Kalimantan Barat mulai ditempati oleh birokrat yang berasal dari etnis Dayak (Buchari, 2014). Contoh ini menjelaskan bahwa politik identitas yang memanfaatkan peluang demokrasi memberi kesempatan kepada warga negara untuk lepas dan bangkit dari pengalaman marginalisasi dan diskriminasi dalam kurun waktu yang cukup lama.

Sementara pada kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 memberi penjelasan yang berbeda. Dimana politik identitas berakhir pada praktik pengeksklusian, diskriminasi terhadap kelompok lain, intoleransi dan konflik berdasarkan identitas agama (Hamid, 2019; Ubaid & Habibisuband, 2017). Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran kedua diikuti oleh dua pasangan calon yaitu: Pasangan Ahok-Djarot dan Anis Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno menggunakan isu identitas berdasarkan etnis dan agama untuk mengalahkan Ahok sebagai calon petahana. Sebagaimana diketahui, Ahok merupakan calon yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama non-muslim. Di tengah perhelatan pesta demokrasi, terjadi mobilisasi massa yang dikenal dengan Aksi Bela Islam untuk mengajak kepada pemilih Jakarta khususnya pemilih muslim untuk tidak memilih Ahok karena bukan seorang muslim. Sebaliknya, aksi ini mengarahkan pemilih untuk memilih Anis-Sandi. Berbagai kampanye negatif berbau politik identitas terus dijalankan oleh tim pemenangan Anis-Sandi, misalnya mengeluarkan seruan untuk melarang menshalatkan jenazah umat muslim yang memilih Ahok.

Kampanye politik Anis-Sandi menggunakan sentimen agama mendapatkan jalan yang mulus karena pasangan tersebut diusung oleh partai berbasis islam, PKS dan berhasil mendapat dukungan dari organisasi islam, FPI dan para ulama. Begitu massifnya penggunaan politik identitas berbasis agama menyebabkan kekalahan Ahok dalam panggung kontestasi elektoral. Padahal, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh banyak lembaga survei menyebut bahwa tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok selama menjabat sebagai gubernur Jakarta sampai pada hari menjelang pemilihan selalu berada pada kisaran angka 70 persen. Jika pemilih Jakarta masuk pada kategori pemilih rasional, seharusnya Ahok dipastikan menang. Namun kekalahan Ahok justru memperlihatkan pembacaan lain bahwa pemilih di Jakarta masih mudah terjebak pada pertimbangan emosional yang berlandaskan pada kesamaan faktor sosiologis, dalam hal ini agama. Politik identitas menjadi senjata yang sangat ampuh bagi Anis-Sandi untuk mengalahkan Ahok. Kebangkitan politik identitas islam pada Pilkada DKI Jakarta dibangun melalui pembentukan *image* sebagai muslim yang mayoritas namun terpinggirkan dan merasa terhina sehingga sesama muslim harus memilih calon pemimpin yang seagama (Sari, 2016).

Pada Pilkada serentak tahun 2018, isu politik identitas terus digunakan oleh calon kandidat untuk mendulang perolehan suara. Untuk menyebut beberapa contoh, Pilkada Jawa Barat memperlihatkan kandidat yang kurang populer diusung oleh Partai Gerindra dan PKS nyaris memenangkan kontestasi elektoral karena kampanye politik yang sangat kental dengan sentimen agama. Sementara pada Pilkada Sumatera Utara, politik identitas juga mendominasi masa-masa kampanye yang berakhir pada kemengan calon kandidat yang didukung oleh PKS dan Gerindra (Simandjuntak, 2018).

Bangkitnya politik identitas dapat dilihat dari dua hal (Romli, 2019): pertama, dalam pemilihan kepala daerah, calon kandidat dan pendukungnya cenderung menggunakan sentimen etnisitas dan agama. Dalam konteks ini, kampanye politik yang sering digemborkan oleh calon kandidat adalah menggiring pemilih untuk memilih calon yang berasal dari wilayah, etnis atau agama yang sama. Kedua, munculnya tuntutan di beberapa daerah untuk menerapkan peraturan daerah berdasarkan agama (perda syariah). Hal ini tidak lepas dari peluang otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk membuat peraturan daerah, termasuk regulasi syariah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Sejak tahun 1998, terhitung tidak kurang dari 443 perda syariah telah diterapkan di Indonesia.

Tidak hanya pada arena politik di tingkat lokal, dalam politik nasional, praktik politik identitas terus mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia pasca orde baru. Pada masa pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 yang mengkontestasikan calon presiden antara Jokowi dan Prabowo sangat kental dengan nuansa politik identitas. Misalnya hal ini dapat terlihat dalam skema pemilihan calon wakil presiden. Komposisi antara calon presiden dan wakil presiden senantiasa mempertimbangkan dua representasi kekuatan politik yaitu nasionalis dan agama. Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada kontestasi pemilihan presiden periode 2019-2024 tidak lepas dari pilihan rasional untuk mendapatkan simpati pemilih muslim khususnya kalangan Nahdliyin (NU), salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia. Terlebih selama ini, figur Jokowi selalu diserang oleh rival politiknya sebagai anti islam dan berpihak pada asing (Perdana & Wildianti, 2019). Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim, pertarungan berebut suara dari pemilih muslim menjadi sebuah pilihan logis dan selalu terjadi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Kendati dikotomi antara santri-abangan semakin kabur, tetapi strategi politik yang menekankan pada pentingnya pasangan calon yang merepresentasikan santri-abangan atau nasionalis-sekuler dan islam masih sangat kuat (Zuhro, 2019).

Salah satu hal untuk memperkuat bekerjanya politik identitas dalam politik elektoral pada pemilihan presiden dapat dilihat dari masa kampanye. Hasil survei Kompas yang dilakukan menjelang pemilu 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 24,5 % menyebut bahwa masa kampanye dipenuhi dengan isu politik identitas berbasis agama, suku, ras dan golongan. Sedangkan sebanyak 27,1 % mengungkapkan bahwa masa kampanye dihiasi dengan isu yang mengasut atau mengadu domba. Data ini mengkonfirmasi bahwa isu-isu identitas dipilih sebagai strategi kampanye oleh kedua pasangan calon. Implikasinya, ruang publik terkait pemilihan presiden disesaki oleh perdebatan soal identitas etnis dan agama yang kerap kali berujung pada tindakan saling serang antar kedua kubu. Implikasinya, pemilu tidak banyak menghadirkan perdebatan programatik dan agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh calon pemimpin. Pemilih menjadi semakin tidak rasional dalam menentukan hak pilihnya karena logika memilih selalu dikonstruksi oleh elit dengan

membantugun ikatan emosional berdasarkan sentimen identitas. Akibatnya, pertimbangan kualitas dan rekam jejak calon tidak menjadi prioritas utama. Sebab yang lebih utama bagi pemilih adalah pertimbangan soal siapa calon kandidat yang memiliki identitas yang sama dengan karakteristik pemilih.

Kampanye politik menggunakan politik identitas dan sering dikemas dengan berita bohong membuat masyarakat Indonesia terjebak pada pusaran konflik yang bekepanjangan. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki identitas yang beragam dan berpotensi konflik, justru konflik tersebut semakin dipertajam oleh elit politik setiap kali memasuki momentum pemilu dengan membangun sentimen identitas. Implikasinya, disintegrasi di tengah masyarakat semakin sulit dibendung. Dikotomi antara "*cebong*" dan "*kampret*" sebagai label yang merepresentasikan dukungan pemilih terhadap dua kubu calon kandidat Jokowi dan Prabowo adalah bukti nyata hadirnya konflik di tengah masyarakat.

Politik identitas tidak hanya dapat dipakai untuk menjelaskan dinamika politik elektoral, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisa berbagai kasus kekerasan dan konflik di tengah masyarakat di luar isu politik elektoral. Pergeseran sistem otoriter menuju demokrasi ternyata tidak banyak memberi harapan terhadap terwujudnya kehidupan sosial politik yang damai dan tentram di bawah payung nasionalisme. Kasus Papua yang terjadi akhir-akhir ini sukses mencuri perhatian publik. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh kekerasan dan pergolakan massa muncul ke permukaan sebagai bentuk ketegangan vertikal dan horizontal. Ketegangan vertikal terjadi antara etnis Papua terhadap pemerintah pusat yang dianggap gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi di tanah Papua. Desain otonomi khusus untuk Papua yang diikuti dengan sejumlah transfer anggaran ternyata tidak bekerja efektif dalam meredam ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah.

Sementara ketegangan horizontal terjadi antar kelompok identitas yang berbeda di suatu wilayah. Ketegangan antara warga pribumi dan non-pribumi di Papua masih menjadi narasi yang sangat kuat dalam kehidupan sosial politik. Kerusuhan yang terjadi di Wamena yang menyerang warga pendatang dari etnis non-Papua adalah fakta empiris akan munculnya konflik identitas. Sedikitnya tidak kurang dari 32 orang pendatang di Papua meninggal akibat kerusuhan di Papua. Ketegangan di Papua awalnya dipicu oleh masalah rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di asrama Malang dan Surabaya. Hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat Papua dengan melakukan berbagai demonstrasi dan aksi kekerasan hingga melibatkan warga pendatang di tanah Papua (cnnindonesia.com, 2019).

Tidak hanya konflik etnis, masyarakat Indonesia masih sangat berpotensi terhadap munculnya konflik atas nama agama atau kepercayaan. Tentu kita masih ingat dengan peristiwa pembantaian yang dialami warga Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten pada tahun 2011 silam. Ribuan warga Cikeusik menuntut untuk membubarkan Jamaah Ahmadiyah karena dianggap memiliki aliran kepercayaan

yang menyimpang. Sedikitnya 3 korban meninggal atas peristiwa berdarah ini (nasional.tempo.co, 2019). Kasus-kasus kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil laporan dari The Wahid Institute tahun 2014 mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan dan intolerensi mengungkap sepanjang tahun 2014 terdapat 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang melibatkan aktor negara maupun aktor non-negara. Sedangkan jumlah korban pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan oleh aktor negara sebanyak 347 jiwa dan sebanyak 89 korban dilakukan oleh aktor non-negara. Bentuk-bentuk pelanggaran dan intoleransi beragama ini meliputi tindakan serangan fisik dan perusakan properti, penyebaran kebencian, penyusutan terhadap kelompok lain, diskriminasi atas dasar agama, pemaksaan keyakinan, pembatasan dan pemaksaan berekspresi (The Wahid Institutue, 2014).

Pemaparan ini mempertegas bahwa gelombang demokratisasi yang diperkenalkan sejak keruntuhan orde baru justru diikuti oleh kebangkitan politik identitas yang berujung pada konflik atas dasar identitas baik vertikal maupun horizontal. Fakta masyarakat yang beragam dan tidak menyatu dan cenderung berkonflik sebagaimana tesis Furnival, justru semakin dipertajam oleh elit politik setiap kali menjelang momentum pemilu baik di tingkat lokal maupun nasional. Perbedaan identitas di tengah masyarakat diaktivasi oleh calon kandidat, partai politik dan pendukung untuk memobilisasi pemilih demi suksesi kontestasi elektoral. Akibatnya masyarakat terus berada dalam bayang-bayang disintegrasi bangsa.

Menakar Perjalanan Demokrasi Indonesia: Sebuah Refleksi

Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soeharto menyebabkan perjalanan demokrasi di Indonesia selama dua dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit (Tornquist dan Savirani, 2016). Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etnisitas dan agama sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, menimbulkan praktik diskriminasi dan pengeksklusian terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Hal ini membuat demokrasi mengalami regresi. Sebab demokrasi menghendaki adanya nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Nilai-nilai demokrasi ini terciderei oleh praktik politik identitas. Kebangkitan politik identitas diperparah oleh kegagalan kelompok masyarakat sipil untuk membangun alternatif politik. Justru kehadiran kekuatan masyarakat sipil pasca orde baru masih lemah karena tetap terjebak pada cara-cara tradisional dalam mencari jalan menuju kekuasaan. Kelompok masyarakat sipil begitu pun dengan elit

politik memobilisasi massa dengan memanfaatkan sentimen identitas yang dibalut dengan gaya populisme dan patronase (Tornquist dan Savirani, 2016).

Politik identitas menguat sejak orde baru runtuh sebagai bentuk letupan ekspresi dari peminggiran politik dan kesenjangan ekonomi yang dialami dalam waktu cukup lama. Sementara rezim yang berkuasa saat itu terus menggunakan cara-cara represif untuk mengubur sentimen identitas dengan dalih menciptakan stabilitas politik. Konsekuensinya, ketika negara yang kuat (otoriter) runtuh, terjadi ledakan emosional yang sangat luar biasa yang berujung pada tindakan anarki dan aksi kekerasan. Negara tidak dapat lagi mempertahankan peran hegemoniknya melalui kontrol yang sangat ketat terhadap rakyat. Pada gilirannya keadaan tersebut membentuk solidaritas etnis dan agama di berbagai daerah untuk berjuang memperebutkan sumber daya ekonomi dan politik yang selama ini tertutup rapat. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh elit lokal yang memainkan peran penting dalam mempertajam sentimen identitas dan agama (Santoso, 2011).

Desentralisasi dan otonomi daerah serta berbagai aturan kelembagaan yang lebih demokratis menjadi pintu bagi kebangkitan politik identitas. Keberadaan politik identitas terus menguat seiring dengan kegagalan negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Negara tidak hadir ditengah ketidakpastian ekonomi politik yang dirasakan rakyat pasca orde baru. Impikasinya, ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara kemudian diisi oleh kelompok-kelompok berdasarkan identitas. Mobilisasi kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah kerap kali menggunakan sentimen identitas berbasis etnis dan agama. Dalam situasi seperti ini, konflik menjadi sesuatu yang sulit dibendung dan bersiap untuk meledak.

Di lain pihak, berbagai peristiwa kekerasan atas nama identitas mengindikasikan bahwa karakter masyarakat Indonesia yang majemuk ini sulit hidup bersama dalam satu narasi yang lebih besar (*common will*). Identitas kelompok yang berbeda ini berpotensi menyebabkan konflik tinggal menunggu faktor pendorong lain yang dapat membangkitkan konflik untuk mencuat ke permukaan. Faktor pendorong ini bisa berupa kekecewaan terhadap pemerintah atau mobilisasi elit politik. Dengan kata lain, secara alamiah masyarakat dengan ragam identitas ini pada dasarnya sudah berpotensi konflik dan menjadi kian rumit ketika masuk faktor lain, terutama faktor *elit driven*.

Pengaruh *elit driven* sering muncul dalam isu-isu politik untuk berebut kekuasaan, seperti isu pemekaran daerah, pengisian jabatan birokrasi hingga isu elektoral. Aspek identitas dieksploitasi oleh elit untuk memobilisasi massa. Politik identitas menjadi strategi dan retorik yang biasa digunakan oleh pemimpin politik untuk merebut kekuasaan. Dalam konteks politik elektoral misalnya, pemilih didorong untuk memilih calon pemimpin berdasarkan kesamaan identitas. Implikasinya, pemilih Indonesia menjadi semakin emosional dimana pertimbangan memilih berdasarkan alasan sosiologis dan kultural bukan lagi berdasarkan pada logika rasional yang mengedepankan rekam jejak, integritas dan kapasitas calon dalam memimpin.

Isu politik identitas akan selalu menghiasi perjalanan demokrasi di Indonesia. Kendati pemilu diselenggarakan secara rutin setiap lima tahunan dan kebebasan berpolitik dibuka lebar, tetapi demokrasi akan terus menghadapi ancaman karena eksistensi praktik politik identitas yang terus dipelihara oleh elit politik untuk mencapai tujuan tertentu. Pengalaman pemilihan presiden dan berbagai praktik pemilu di tingkat lokal sudah cukup untuk mempetegas bahwa politik identitas akan selalu hadir dalam lanskap politik Indonesia.

Kesimpulan

Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soeharto menyebabkan perjalanan demokrasi di Indonesia selama dua dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit. Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etnisitas dan agama telah menimbulkan praktik diskriminasi dan pengeksklusian terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik yang memainkan peran penting dalam mempertajam sentimen identitas dan agama untuk mendapatkan kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu. Hal ini membuat demokrasi Indonesia mengalami regresi.

Referensi

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesia Tera.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia & LSI.
- Buchari, S., R. (2014). *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chandakirana, K. (1989). Geertz dan Masalah Kesukuan. Jakarta. Prisma No. 2/1989.
- Cnnindonesia.com. (2019). Polisi Sebut 33 Korban Tewas Di Wamena Akibat Kerusuhan. Online. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191028204602-20443648/polisi-sebut-33-korban-tewas-di-wamena-akibat-kerusuhan>
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus, and Giroux
- Geertz, Clifford. (1963). *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in The New States*. New York: Free Press.
- Geertz, Clifford. (1983). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Hamid, A. (2019) Populism In The 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of Governance*, Vol 4, No 1

- Jumadi. (2003). Fenomena Etnis Dalam Proses Rekrutmen Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalbar 2000-2005. Yogyakarta. Tesis UGM.
- Morowitz. D., L. (1998). Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk. Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi Bandung. ITB Pres
- Habbodin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol 3, No 1.
- Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Sosial Politik*, Vol 13, No 2.
- Hikmawan, M. D. (2017a). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2017b). Politik Perbedaan: Minnoritas dalam Implementasi Kebijakan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1(1), 88–98.
- Huntington, S.,P. (2007). Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia (terj.). Yogyakarta: Qalam
- Lee, H. (2009). Furnivall's Plural Society and Leach's Political Systems of Highland Burma. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 24(1), 32-46. Retrieved from www.jstor.org/stable/41308110
- Levistky, S & Ziblat, D. (2018). Bagaimana Demokasi Mati. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia's party systems of the 1950s and the post-Suharto era: From centrifugal to centripetal inter-party competition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39(3), pp 431–453 October 2008.
- Perdana, A & Wildianti, D. (2019). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Jakarta: Bawaslu RI.
- Nasional.tempo.co. (2019). Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Di Cikeusik. Online. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/311441/kronologi-penyerangan-jamaah-ahmadiyah-di-cikeusik>
- Nordholt, H, S., & Klinken, G. (2007). Politik Lokal Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta
- Robinson, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets. London: Routletge.
- Romli, L. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol 4, No 1.
- Santoso, Purwo. (2011). Proliferation of Local Governments in Indonesia: Indentity Politics within a Troubled Nation State. *Journal of Power Conflict Democracy*, Vol 3, No 1.
- Sari, Endang (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2, No 2.

- Simandjuntak, D. (2018). Identity politics looms over Indonesia's presidential election. Retrieved November 13, 2018, from <http://www.eastasiaforum.org/2018/11/10/identity-politics-looms-over-indonesias-presidential-election/>
- Slater, D. (2004). Indonesian Accountability Traps: Party Cartels and Presidential Power After Democracy Transition. *Indonesia*, No. 78 (Oktober).
- The Wahid Institute. (2014). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi. Jakarta: The Wahid Institute.
- Tirto.id. (2017). 13 Hari Pembantaian Orang Cina di Jakarta. Online. Diakses dari <https://tirto.id/13-hari-pembantaian-orang-cina-di-jakarta-cx2Y>
- Tornquist, O. (2013). Assessing dynamics of democratisation: Transformative politics, new institutions, and the case of Indonesia. China: Palgrave Macmillan.
- Tornquist, O & Savirani, A. (2016). Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto. Yogyakarta: PolGov.
- Ubaid, A.H & Habibusabandi, H.,B. (2017). Political Polarization based on Religious Identities: Empirical Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol 8, No 4.
- Winters, J. (2014). Oligarchy and Democracy in Indonesia. In M. Ford, & T. Pepinsky, *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. New York: Cornell University Press.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 16, No 1.